EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Ni Made Nina Novi Anti, I Gede Agus Kurniawan

Universitas Pendidikan Nasional, gedeguskurniawan@undiknas.ac.id

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan di pengadilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menekan angka perceraian, hukum acara perdata menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, efektivitas mediasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum mediasi berdasarkan hukum acara perdata Indonesia serta menganalisis peran mediator dalam menentukan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis melalui kajian dokumen hukum, peraturan terkait, serta teori efektivitas Lawrence M. Friedman untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif, bukan sekadar formalitas hukum. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menghasilkan akta perdamaian yang mengikat secara hukum, sedangkan kegagalannya tetap memiliki implikasi terhadap sahnya proses persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran mediator dengan kerangka teori Friedman sekaligus penekanan bahwa mediasi di pengadilan negeri—yang lebih sering dipandang sebagai ranah pengadilan agama—juga memiliki urgensi dan implikasi hukum yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum acara perdata khususnya dalam penerapan mediasi perceraian di lingkungan peradilan umum.

Kata kunci: Mediasi, Perceraian, Efektivitas

Abstract

Divorce is one of the most frequently filed cases in Indonesian courts, including the Denpasar District Court. In order to reduce the rising number of divorce cases, civil procedural law mandates mediation as a compulsory stage that must be undertaken before the case proceeds to substantive examination. However, the effectiveness of mediation is often influenced by various factors, namely the structure of the law, the substance of the law, and the prevailing legal culture of society. This research aims to examine the legal implications of mediation within the framework of Indonesian civil procedural law and to analyze the role of mediators in determining the effectiveness of mediation in divorce cases at the Denpasar District Court. The study employs normative legal research methods using both statutory and conceptual approaches. Data were analyzed through legal document reviews, relevant statutory regulations, and Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness to assess the factors influencing the success of mediation. The findings indicate that mediators play a pivotal role in ensuring that mediation functions effectively, rather than merely serving as a legal formality. Successful mediation in the Denpasar District Court produces a peace deed (akta perdamaian) with binding legal force, while its failure still carries implications for the validity of the trial process. The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the mediator's role through Friedman's theoretical framework, while also emphasizing that mediation in district courts—often perceived as the domain of religious courts—holds equal urgency and significant legal implications. These findings contribute to the scholarly discourse on civil procedural law, particularly regarding the application of divorce mediation within the general judiciary.

Keywords: Mediation, Divorce, Effectiveness

1. Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya hadir sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.¹ Keberadaan hukum diharapkan mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi semua orang yang hidup dalam suatu negara.² Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap permasalahan sosial yang menimbulkan perselisihan diatur dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Salah satu persoalan yang sering muncul dan berdampak langsung pada ketertiban sosial adalah masalah sengketa perdata, khususnya perkara perceraian. Oleh karena itu, hukum tidak hanya menjadi pedoman perilaku masyarakat, tetapi juga instrumen penyelesaian konflik yang secara ideal mampu mewujudkan solusi adil bagi para pihak yang berperkara.³

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan. Sistem peradilan sering menghadapi kendala berupa lamanya proses, tingginya biaya, serta beban perkara yang menumpuk.⁴ Dalam kondisi demikian, lahirlah gagasan mengenai penyelesaian sengketa alternatif atau yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR menawarkan mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada kesepakatan damai. Mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang menonjol dan kini diintegrasikan secara formal ke dalam proses peradilan di Indonesia. Mediasi dalam lingkup peradilan memberikan jalan tengah antara penyelesaian melalui pengadilan dan melalui jalur non-litigasi.⁵

Dalam ranah hukum keluarga, perkara perceraian menjadi salah satu perkara perdata yang jumlahnya cukup tinggi di Indonesia. Perceraian bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga berdampak sosial, psikologis, bahkan ekonomi bagi pihak yang terlibat.⁶ Lembaga peradilan memegang peran sentral dalam

---

¹ Nazla Arliva Rahman, Kaila Intan Fatimah, and Fathiatrysa Hamada, "Praktik Dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1.A (January 31, 2025): 185–95, <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9545>.

² Rian Hidayatulloh Garuda Nusantara, Nadhif Tanzil Haikal Harahap, and Rian Hidayatulloh Garuda Nusantara, "FILSAFAT HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKA," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (June 23, 2025), <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxx>.

³ Firwanda Sandi Pradipta, Trubus Rahadiansyah, and Maya Indrasti Notoprayitn, "Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 31, 2025): 1225–32, <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I2.1297>.

⁴ Salma Zulfa Yahya et al., "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1 (2025): 448–58, <https://doi.org/10.32672/MISTER.V2I1.2472>.

⁵ Dahliani Dahliani and Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (April 9, 2025): 46–69, <https://doi.org/10.58824/JDLS.V2I1.322>.

⁶ Mufid Arsyad and A. Kumedi Ja'far, "Penyebab Kasus Cerai Gugat Studi Di Pengadilan Agama Kota Metro,"

menangani perkara perceraian, baik di Pengadilan Agama bagi umat Islam maupun di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim.⁷ Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa masalah rumah tangga di masyarakat tidak sedikit, sehingga negara perlu menghadirkan instrumen hukum yang dapat mengurangi dampak buruk perceraian. Mediasi hadir sebagai salah satu mekanisme yang diharapkan mampu meredam eskalasi konflik rumah tangga, serta membuka ruang perdamaian sebelum perkara diputus oleh hakim.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS), jumlah kasus perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang substansial. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 463.654 kasus perceraian di Indonesia. Angka ini memang mengalami penurunan sekitar 10,2% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 516.344 kasus, namun secara historis, tren perceraian di Indonesia cenderung fluktuatif dengan angka yang tetap tinggi dalam beberapa tahun terakhir.⁸ Seperti, pada tahun 2021, jumlah kasus perceraian mencapai 447.743 kasus, dan pada tahun 2019 tercatat 438.013 kasus. Mayoritas kasus perceraian ini diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), dan faktor utama penyebabnya seringkali adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, diikuti oleh masalah ekonomi.⁹

Fenomena serupa juga terjadi di Provinsi Bali. Meski Bali dikenal dengan kuatnya nilai adat, spiritualitas, dan budaya kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat,¹⁰ namun kenyataannya angka perceraian tetap menunjukkan tren kenaikan. Sebagai ibu kota Provinsi Bali dan pusat aktivitas ekonomi serta populasi, Kota Denpasar menunjukkan konsentrasi kasus perceraian yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain di Bali. Berdasarkan data BPS pada periode 2022-2024 Denpasar merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat perceraian tertinggi di pulau Bali. Pada tahun 2022, terdapat 115 data perceraian di Denpasar, kemudian pada tahun 2023 perceraian naik dengan pesat sebanyak 445 perceraian dan di tahun 2024 mengalami penurunan dengan jumlah 434 perceraian dengan faktor pertengkaran terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak menjadi yang terbanyak.¹¹

AL-SULTHANIYAH 14, no. 2 (June 16, 2025): 211–22, <https://doi.org/10.37567/AL-SULTHANIYAH.V14I2.3331>.

⁷ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 7, 2022): 25–40, <https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V8I1.765>.

⁸ Muhammad Syahril, "Jumlah Perceraian Di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus," Kompas.com, May 16, 2024, https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus?lgn_method=google&google_btn=onetap.

⁹ "Cara Pengajuan Gugat Cerai Menurut Undang-Undang Perkawinan," SIP Law Firm, October 26, 2023, <https://siplawfirm.id/cara-pengajuan-gugat-cerai-menurut-undang-undang-perkawinan/?lang=id>.

¹⁰ Monica Faunelzi Putri, "Pemertahanan Bahasa Bali Di Lingkungan Masyarakat Desa Suro Bali Di Kabupaten Kepahiang" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

¹¹ Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Di Provinsi Bali, 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali," Badan Pusat

Penerapan mediasi dalam perkara perceraian secara formal telah lama dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia. Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan ke pokok perkara.¹² Rumusan Pasal 130 HIR menyatakan: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akta...”.¹³ Ketentuan ini menegaskan bahwa upaya perdamaian bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus ditempuh dalam proses peradilan.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi.¹⁴ Dalam konteks perceraian, mediasi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri yang bersengketa agar menempuh jalan damai dan mempertimbangkan kembali keutuhan rumah tangga mereka. Dengan adanya aturan ini, lembaga peradilan menempatkan mediasi sebagai instrumen utama untuk mendorong perdamaian. Namun, implementasi dari aturan tersebut sering kali menghadapi tantangan, baik yang bersumber dari para pihak yang bersengketa, mediator, maupun kondisi sosial-budaya setempat.

Khusus di Bali, Pengadilan Negeri Denpasar merupakan salah satu pengadilan yang cukup banyak menangani perkara perceraian. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pariwisata, dan perekonomian di Bali memiliki dinamika sosial yang khas. Mobilitas penduduk yang tinggi, keberagaman latar belakang sosial-budaya, serta tekanan kehidupan perkotaan menjadi faktor yang turut mempengaruhi meningkatnya perkara perceraian. Dalam konteks ini, mediasi yang diwajibkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 diharapkan dapat berfungsi secara

---

Statistika Provinsi Bali, February 14, 2025, <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-regency-municipality-and-factors-in-bali-province--2022.html>.

¹² Yusna Wulan Sari, “PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF MEDIASI DALAM RUANG LINGKUP PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN NEGERI,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (May 18, 2025): 146–60, <https://doi.org/10.33059/JHSK.V2011.11281>.

¹³ Dara Quthni Effida et al., “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMU,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (May 1, 2025): 91–102, <https://doi.org/10.35308/JIC.V9I1.11793>.

¹⁴ Eva Susanna et al., “SOSIALISASI ‘PERAN MEDIATOR DALAM AGENDA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA,’” *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG INOTEC* 7, no. 1 (April 27, 2025): 11–15, <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jpkmi/article/view/4870>.

optimal. Namun, fakta empiris sering menunjukkan bahwa mediasi justru menjadi formalitas semata, karena banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tekad bulat untuk bercerai tanpa mempertimbangkan kemungkinan berdamai. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana mediasi benar-benar efektif diterapkan dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai efektivitas mediasi sebagai instrumen hukum yang diandalkan untuk meredam angka perceraian. Efektivitas mediasi bukan hanya soal keberhasilan menekan jumlah perkara, tetapi juga menyangkut kualitas penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap kepentingan anak serta pihak yang rentan. Jika mediasi hanya dijalankan sebatas memenuhi ketentuan formal tanpa hasil yang berarti, maka tujuan luhur dari kebijakan mediasi menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar berlangsung, sejauh mana peran mediator dijalankan, serta apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya.

Dengan adanya penelitian tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai peran mediasi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara norma hukum dan realitas sosial, khususnya dalam konteks perceraian. Hasil penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pada pengembangan praktik mediasi yang lebih baik, sehingga lembaga peradilan tidak hanya menjadi arena formal untuk memutuskan sengketa, tetapi juga wadah yang sungguh-sungguh mendukung terciptanya keadilan yang damai dan bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan, baik dari sisi akademik maupun dari sisi praktik hukum peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana peran mediator terhadap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar dan bagaimana implikasi hukum mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia?

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan mediasi dalam perkara perceraian. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi seperti Pasal 130

HIR, Pasal 154 RBg, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian doktrin serta teori efektivitas hukum dan penyelesaian sengketa perdata. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait perceraian dan mediasi, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum serta ensiklopedia hukum. Semua bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber cetak maupun digital. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi, sedangkan analisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan menafsirkan bahan hukum, menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman serta doktrin penyelesaian sengketa, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai efektivitas dan implikasi hukum mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Pembahasan

Mediator memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan mediasi, di mana struktur hukum melalui kewajiban hakim atau mediator bersertifikat, substansi hukum melalui ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, serta kultur hukum masyarakat menjadi faktor yang saling berinteraksi dalam memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang aktif, komunikatif, dan memahami psikologi para pihak dapat menciptakan ruang dialog yang lebih sehat sehingga mediasi tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi benar-benar mewujudkan perdamaian dalam perkara perceraian. Dengan demikian, peran mediator di Pengadilan Negeri Denpasar dapat dikatakan sangat menentukan dalam menjembatani kepentingan hukum dan emosional para pihak, karena implikasi hukum mediasi adalah menjadikannya sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Mediasi yang berhasil akan menghasilkan akta perdamaian berkekuatan hukum tetap, sedangkan kegagalannya tetap berimplikasi pada sahnya proses litigasi, di samping itu juga membawa implikasi berupa efisiensi peradilan, perlindungan hak-hak anak, dan pencegahan konflik sosial yang lebih luas. Namun, jika mediasi hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa kesungguhan mediator maupun para pihak, maka tujuan hukum acara perdata untuk mewujudkan perdamaian sulit tercapai, sehingga keberhasilan mediasi pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan aturan hukum serta kualitas pelaksanaan di lapangan.

3.1. Implikasi Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Mediasi, dalam hukum acara perdata Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa di pengadilan. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menegaskan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan prioritas utama dalam hukum acara perdata. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, kewajiban tersebut diperkuat dan diperinci, menjadikan mediasi tidak hanya sebagai anjuran tetapi juga prosedur formal yang wajib dilaksanakan. Artinya, mediasi bukan sekadar alternatif, melainkan bagian integral dari mekanisme hukum acara perdata.

Implikasi hukum dari mediasi adalah bahwa setiap gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi.¹⁵ Hal ini menempatkan mediasi sebagai prasyarat sebelum perkara diperiksa oleh hakim. Jika proses mediasi tidak ditempuh sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, mediasi memiliki implikasi yuridis yang sangat kuat, yakni menentukan sah atau tidaknya proses persidangan berikutnya. Bagi Pengadilan Negeri Denpasar, hal ini berarti seluruh perkara perceraian harus tunduk pada tahapan mediasi.

Mediasi dalam perkara perceraian juga memiliki implikasi hukum terhadap status hubungan perkawinan.¹⁶ Apabila mediasi berhasil, maka para pihak akan membuat kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading).¹⁷ Akta ini kemudian dikuatkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Implikasi ini sangat penting karena memberikan jalan bagi penyelesaian damai yang mengikat secara hukum. Dengan kata lain, keberhasilan mediasi tidak hanya menghentikan proses perceraian, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil, perkara perceraian akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dalam persidangan. Implikasi hukumnya adalah bahwa kegagalan mediasi membuka jalan bagi hakim untuk memeriksa pokok perkara hingga menjatuhkan putusan cerai. Namun demikian, kegagalan mediasi tidak

---

¹⁵ Muhammad Yusuf Afandi and Dahlan Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 9, no. 1 (February 6, 2025): 241–54, <https://doi.org/10.36526/SANTHET.V9I1.5024>.

¹⁶ Devin Jinoto, "Konflik Kepemilikan Properti Akibat Perkawinan Tanpa Akta: Kajian Hukum Keluarga Di Era Digital," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (June 29, 2025): 1–15, <https://doi.org/10.56370/JHLG.V6I6.934>.

¹⁷ Afandi and Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi."

menghapuskan fakta bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk berdamai sesuai amanat hukum acara perdata. Oleh karena itu, mediasi tetap memiliki nilai yuridis meskipun hasilnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata menempatkan mediasi sebagai proses yang wajib dihormati.

Implikasi hukum lain dari mediasi adalah pada kedudukan mediator. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, mediator dapat berasal dari hakim atau non-hakim yang bersertifikat.¹⁸ Dalam konteks Pengadilan Negeri Denpasar, mediator memiliki kewenangan formal untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perceraian. Jika mediator berhasil mendamaikan para pihak, hasil mediasi tersebut mengikat secara hukum setelah dikuatkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, mediator bukan sekadar fasilitator, tetapi juga bagian dari struktur hukum acara perdata.

Dari perspektif hukum acara perdata, mediasi juga berimplikasi terhadap efisiensi proses peradilan. Mediasi yang berhasil menghentikan perkara akan mengurangi beban pengadilan dan mempercepat tercapainya penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹ Dengan demikian, mediasi tidak hanya berimplikasi pada pihak yang berperkara, tetapi juga pada sistem peradilan secara keseluruhan. Bagi Pengadilan Negeri Denpasar, hal ini berarti mediasi dapat menjadi instrumen untuk menekan angka tunggakan perkara perceraian.

Mediasi juga memiliki implikasi hukum terhadap perlindungan hak-hak anak dan pihak yang rentan dalam perceraian. Dalam hukum acara perdata, hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak. Jika mediasi berhasil, para pihak dapat menyepakati pengaturan hak asuh, nafkah, dan pembagian harta bersama secara damai. Akta perdamaian yang lahir dari mediasi akan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan anak. Dengan demikian, mediasi berimplikasi langsung pada perlindungan hak-hak yang mungkin terabaikan jika perkara diputus sepihak oleh hakim.

Selain itu, implikasi hukum mediasi dalam perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar juga terkait dengan upaya pencegahan konflik sosial. Perceraian sering kali tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga keluarga besar dan lingkungan sekitar. Mediasi yang berhasil menciptakan kesepakatan damai

---

¹⁸ Novaldi Rhamadani Herda, Fauzah Nur Aksa, and Jumadiah Jumadiah, "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DALAM SENGKETA KEWARISAN (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (August 19, 2025), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/23336>.

¹⁹ Abdulloh Afifil Mu'ala, "Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (July 31, 2025): 213–22, <https://doi.org/10.54298/TARUNALAW.V3I02.548>.

berpotensi meredam konflik yang lebih luas. Dalam perspektif hukum acara perdata, hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang mengedepankan perdamaian sebagai penyelesaian utama. Oleh karena itu, mediasi memiliki implikasi sosial yang diakui sebagai bagian dari fungsi hukum acara.

Di sisi lain, terdapat pula implikasi hukum apabila mediasi hanya dijalankan sebagai formalitas. Jika mediator tidak berupaya maksimal atau para pihak datang tanpa niat berdamai, maka mediasi kehilangan esensinya. Dalam hal ini, mediasi tidak lagi menjadi sarana efektif, melainkan sekadar syarat administratif yang harus dilalui. Implikasi hukumnya adalah menurunnya kredibilitas lembaga peradilan dan terjadinya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik hukum. Hal ini menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Denpasar dalam memastikan bahwa mediasi tidak hanya formal, tetapi juga substansial.

Implikasi hukum mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya prosedur formal, tetapi juga instrumen yuridis yang menentukan jalannya persidangan. Dengan dasar hukum acara perdata, mediasi mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi, serta perlindungan hak-hak para pihak dan anak. Namun, jika hanya dijalankan sebagai formalitas, mediasi kehilangan makna dan tidak berimplikasi substantif. Oleh karena itu, di Pengadilan Negeri Denpasar, mediasi seharusnya dipahami dan dijalankan sebagai sarana utama yang dapat menghadirkan keadilan yang damai, bukan sekadar syarat administratif dalam proses perceraian.

3.2. Peran Mediator Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar

Peran mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar tidak dapat dilepaskan dari kerangka struktur hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman. Mediator berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan yang bertugas menjembatani komunikasi antara pihak suami dan istri yang bersengketa.²⁰ Dalam struktur hukum, mediator menempati posisi penting karena menjadi representasi dari lembaga peradilan dalam upaya mendamaikan para pihak sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Jika mediator melaksanakan perannya dengan profesional, maka struktur hukum akan bekerja sebagaimana mestinya, yakni memberikan kesempatan pada para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator sebagai bagian dari struktur hukum itu sendiri.

Dari sisi substansi hukum, peran mediator mendapatkan dasar yuridis yang kuat dalam Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

---

²⁰ Ayu Aulia Muhasari, "Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/8342/>.

di Pengadilan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perkara perdata, termasuk perceraian, wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu. Mediator dalam hal ini menjadi pelaksana dari substansi hukum yang telah ditetapkan oleh pembentuk hukum. Apabila mediator mampu menjalankan ketentuan hukum tersebut dengan baik, maka norma hukum yang tertulis akan terwujud dalam praktik. Namun, jika mediator hanya menjalankan perannya secara formalitas tanpa upaya mendalam, maka substansi hukum tentang kewajiban mediasi tidak akan tercapai secara efektif.

Peran mediator juga harus dipahami dalam konteks budaya hukum masyarakat di Denpasar. Budaya hukum merujuk pada sikap, kesadaran, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam perkara perceraian, banyak pihak datang ke pengadilan dengan tekad yang sudah bulat untuk bercerai, sehingga kurang memberi ruang bagi mediator untuk membangun kompromi. Budaya hukum yang cenderung menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir kadang menjadi hambatan bagi mediator dalam menumbuhkan kesadaran damai. Oleh karena itu, efektivitas peran mediator tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi, tetapi juga oleh budaya hukum para pihak yang berperkara.

Mediator idealnya tidak hanya berperan sebagai pihak yang pasif memfasilitasi proses perundingan, tetapi juga harus mampu menciptakan suasana dialog yang konstruktif. Dalam teori Friedman, peran mediator yang aktif dan komunikatif akan memperkuat fungsi struktur hukum agar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.²¹ Misalnya, mediator harus mampu menggali alasan perceraian, menilai kemungkinan adanya perdamaian, serta memberikan perspektif mengenai dampak sosial dan psikologis perceraian, terutama terhadap anak. Dengan melakukan hal tersebut, mediator tidak sekadar menjadi perantara, melainkan katalisator tercapainya kesepakatan damai. Keaktifan mediator inilah yang akan meningkatkan efektivitas mediasi.

Kualitas profesional mediator sangat memengaruhi efektivitas mediasi. Friedman menekankan bahwa dalam struktur hukum, aktor-aktor yang berperan harus memiliki kompetensi dan integritas agar hukum dapat berfungsi. Mediator yang memiliki keterampilan komunikasi, empati, serta pengetahuan hukum keluarga yang memadai, akan lebih efektif dalam membantu para pihak menemukan titik temu. Sebaliknya, mediator yang menjalankan perannya sekadar memenuhi kewajiban formal, cenderung gagal menciptakan kesepakatan damai. Dengan demikian, profesionalitas mediator merupakan faktor determinan dalam

---

²¹ Rojali Rahman and Akhmad Munawar, "PERANAN MEDIATOR DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, no. 1 (March 1, 2025), <https://journalversa.com/s/index.php/jhe/article/view/666>.

menentukan berhasil atau tidaknya mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar.

Dari perspektif substansi hukum, peran mediator juga mencakup penerjemahan norma hukum ke dalam praktik nyata. Mediator harus mampu menjelaskan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 secara sederhana kepada para pihak agar mereka memahami bahwa mediasi bukan sekadar formalitas. Pengetahuan hukum yang dimiliki mediator memungkinkan substansi hukum menjadi lebih hidup dan aplikatif. Jika substansi hukum hanya dipahami sebagai teks normatif tanpa interpretasi yang tepat, maka keberadaan aturan tersebut tidak memiliki nilai fungsional. Oleh karena itu, mediator berperan penting sebagai penghubung antara teks hukum dan implementasi hukum.

Pada aspek budaya hukum, mediator perlu menyesuaikan perannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat Denpasar yang unik. Bali memiliki karakteristik budaya yang sarat dengan nilai adat, agama, dan tradisi yang memandang perkawinan sebagai ikatan sakral. Mediator dapat memanfaatkan nilai-nilai budaya tersebut untuk membangun argumen moral dan sosial agar para pihak mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai. Dengan memadukan hukum positif dan kearifan lokal, mediator berpotensi meningkatkan efektivitas mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediator harus adaptif terhadap budaya hukum masyarakat tempat ia menjalankan tugas.

Namun demikian, efektivitas peran mediator sering kali terbentur pada kenyataan bahwa para pihak lebih memilih jalur litigasi. Banyak pasangan yang datang ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah memiliki alasan kuat dan keputusan final untuk berpisah. Kondisi ini membuat ruang gerak mediator menjadi sempit, karena budaya hukum para pihak lebih condong pada penggunaan hak hukum untuk bercerai ketimbang mencari perdamaian. Dalam konteks Friedman, lemahnya budaya hukum pro-perdamaian menjadi faktor penghambat bagi efektivitas peran mediator. Oleh karena itu, mediator perlu memiliki strategi untuk membuka kembali ruang kompromi meski para pihak telah cenderung keras pada pendiriannya.

Peran mediator dalam efektivitas mediasi juga harus dilihat dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara netralitas dan ketegasan. Mediator yang terlalu netral tanpa arahan cenderung tidak dapat membawa para pihak menuju solusi, sementara mediator yang terlalu mengarahkan bisa dianggap tidak adil. Dalam kerangka teori Friedman, keseimbangan peran mediator inilah yang menentukan apakah struktur hukum dapat bekerja sesuai tujuannya. Dengan keseimbangan tersebut, mediator mampu menghadirkan mediasi yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan bermakna.

Oleh karena itu, peran mediator terhadap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar dapat dinilai sangat strategis dalam

kerangka teori Friedman. Mediator menjadi titik temu antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang menentukan apakah mediasi dapat mencapai tujuan perdamaian. Jika mediator mampu berperan secara profesional, komunikatif, adaptif terhadap budaya, serta konsisten menegakkan norma hukum, maka mediasi memiliki peluang besar untuk berhasil. Sebaliknya, jika mediator tidak memainkan peran strategis tersebut, mediasi hanya akan menjadi formalitas prosedural. Dengan demikian, mediator bukan sekadar pelaksana kewajiban hukum, tetapi aktor kunci dalam mewujudkan efektivitas hukum mediasi perceraian.

Peran mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar merupakan faktor penentu yang menghubungkan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat. Efektivitas mediasi hanya dapat terwujud jika mediator mampu mengoptimalkan posisinya dalam struktur hukum, menerjemahkan substansi hukum ke dalam praktik, serta menyesuaikan diri dengan budaya hukum lokal. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi sangat bergantung pada bagaimana mediator menjalankan perannya secara profesional, komunikatif, dan adaptif

4. Kesimpulan

Mediator memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan mediasi. Struktur hukum melalui kewajiban hakim atau mediator bersertifikat, substansi hukum melalui ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, serta kultur hukum masyarakat menjadi faktor yang saling berinteraksi dalam memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang aktif, komunikatif, dan memahami psikologi para pihak dapat menciptakan ruang dialog yang lebih sehat, sehingga mediasi tidak hanya menjadi formalitas hukum tetapi benar-benar mewujudkan perdamaian dalam perkara perceraian. Dengan demikian, peran mediator di Pengadilan Negeri Denpasar dapat dikatakan sangat menentukan dalam menjembatani kepentingan hukum dan emosional para pihak.

Implikasi hukum mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar adalah menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Mediasi yang berhasil menghasilkan akta perdamaian berkekuatan hukum tetap, sedangkan kegagalannya tetap berimplikasi pada sahnya proses litigasi. Implikasi lainnya mencakup efisiensi peradilan, perlindungan hak-hak anak, dan pencegahan konflik sosial yang lebih luas. Namun, jika mediasi hanya dijalankan secara formalitas tanpa kesungguhan mediator dan para pihak, maka tujuan hukum acara perdata untuk mewujudkan perdamaian menjadi sulit tercapai.

Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan aturan hukum serta kualitas pelaksanaan di lapangan.

Diperlukan penguatan kualitas mediator melalui pelatihan intensif, peningkatan keterampilan komunikasi, serta penguasaan aspek psikologis dalam menangani konflik rumah tangga. Pengadilan Negeri Denpasar juga perlu memastikan bahwa proses mediasi dilaksanakan secara substansial, bukan sekadar formalitas administratif, dengan pengawasan yang lebih ketat dari majelis hakim. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya mediasi sebagai upaya damai yang menguntungkan kedua belah pihak, terutama dalam menjaga kepentingan anak. Dengan kombinasi regulasi yang kuat, mediator yang kompeten, dan partisipasi aktif masyarakat, mediasi dalam perkara perceraian dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen efektif dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.

5. Referensi

- abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, And Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (February 7, 2022)
- Afandi, Muhammad Yusuf, And Dahlan Dahlan. "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 9, No. 1 (February 6, 2025)
- Arsyad, Mufid, And A. Kumedi Ja'far. "Penyebab Kasus Cerai Gugat Studi Di Pengadilan Agama Kota Metro." *Al-Sulthaniyah* 14, No. 2 (June 16, 2025)
- Bali, Badan Pusat Statistika Provinsi. "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Di Provinsi Bali, 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali." Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, February 14, 2025. <https://Bali.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/3/Yvdou1iwvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwrfvumdkjmw==/Number-Of-Divorces-By-Regency-Municipality-And-Factors-In-Bali-Province--2022.Html>
- Sip Law Firm. "Cara Pengajuan Gugat Cerai Menurut Undang-Undang Perkawinan," October 26, 2023. <https://Siplawfirm.Id/Cara-Pengajuan-Gugat-Cerai-Menurut-Undang-Undang-Perkawinan/?Lang=Id>.
- Dahlioni, Dahlioni, And Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia." *Journal Of Dual Legal Systems* 2, No. 1 (April 9, 2025)
- Effida, Dara Quthni, Neli Prastia, Nila Trisna, And Adella Yuana. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Terhadap Perkara Perdata Di

Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar

- Pengadilan Negeri Suka Makmur." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 9, No. 1 (May 1, 2025)
- Herda, Novaldi Rhamadani, Fauzah Nur Aksa, And Jumadiah Jumadiah. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Mediator Non-Hakim Dalam Sengketa Kewarisan (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 3 (August 19, 2025).
- Jinoto, Devin. "Konflik Kepemilikan Properti Akibat Perkawinan Tanpa Akta: Kajian Hukum Keluarga Di Era Digital." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 6 (June 29, 2025).
- Mu'ala, Abdulloh Afifil. "Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Taruna Law: Journal Of Law And Syariah* 3, No. 02 (July 31, 2025).
- Muhasari, Ayu Aulia. "Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Nusantara, Rian Hidayatulloh Garuda, Nadhif Tanzil Haikal Harahap, And Rian Hidayatulloh Garuda Nusantara. "Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, No. 01 (June 23, 2025)
- Pradipta, Firwanda Sandi, Trubus Rahadiansyah, And Maya Indrasti Notoprayitn. "Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 2 (May 31, 2025)
- Putri, Monica Faunelzi. "Pemertahanan Bahasa Bali Di Lingkungan Masyarakat Desa Suro Bali Di Kabupaten Kepahiang." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Qotrunnada, Eliza, And Abdullah Fikri. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 15, No. 1 (June 2, 2025).
- Rahman, Nazla Arliva, Kaila Intan Fatihah, And Fathiatrysa Hamada. "Praktik Dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, No. 1.A (January 31, 2025).
- Rahman, Rojali, And Akhmad Munawar. "Peranan Mediator Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, No. 1 (March 1, 2025).
- Sari, Yusna Wulan. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi Dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, No. 1 (May 18, 2025).
- Susanna, Eva, Yusnaldi Kamaruzzaman, Fitriliana Fitriliana, Lisnawati Lisnawati, Kesumawati Kesumawati, And Salwa Hayati Hasan. "Sosialisasi 'Peran

Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar

Mediator Dalam Agenda Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Inotec* 7, no. 1 (April 27, 2025).

Syahrial, Muhammad. “Jumlah Perceraian Di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus.” *Kompas.com*, May 16, 2024.

Yahya, Salma Zulfa, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, and Anisa Oki Hidayah. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1 (2025).